

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia tergolong sebagai sektor dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023, tercatat sebanyak 28.419.398 rumah tangga usaha pertanian dan 29.343.202 unit usaha pertanian perorangan..¹ Angka tersebut lebih tinggi dibanding sektor usaha mikro dan kecil yang hanya berkisar 4.500.584.² Hal ini menjadi bukti bahwa sektor pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat dominan dalam perekonomian negara, mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan kondisi alam yang mendukung keberagaman hasil pertanian

Di desa sendiri pada umumnya melangsungkan hidup menyesuaikan dengan kondisi geografis desanya. Mayoritas penduduk di wilayah perdesaan menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor pertanian sebagai petani yang mengandalkan hasil alam. Kondisi geografis yang mendorong masyarakat pedesaan untuk memiliki lahan pertanian sebagai sumber produksi. Cukup banyak dari masyarakat desa yang mengandalkan lahan pertanian sebagai penghasilan sehari-hari. Selain kondisi geografis

¹ Data Pada Pusat Statistik [Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I - Badan Pusat Statistik Indonesia](#) diakses pada 28 Januari 2025 pukul 19.30

² Data Pada Pusat Statistik [Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#), diakses pada 28 Januari 2025 pukul 19.34

yang mendukung, masyarakat desa memilih pekerjaan ini juga dilatarbelakangi dengan pendidikan yang dimiliki.

Pertanian memiliki peran penting dalam keberlangsungan Indonesia salah satunya yaitu dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, argumen ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Theodora Melati dan Idris dengan judul penelitian “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian di Indonesia” yang menghasilkan bahwa sektor pertanian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia.³

Selanjutnya pertanian juga berperan dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini didukung dengan penelitian “Peran Pertanian Dalam Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Negara Berkembang Kawasan Asia Timur dan Pasifik” oleh Stevany Keren Tiara Monica yang menghasilkan pengurangan tingkat kemiskinan nasional di negara-negara berkembang kawasan Asia Timur dan Pasifik dapat diwujudkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, serta melalui akselerasi pertumbuhan rata-rata tahunan nilai tambah sektor tersebut. Lebih lanjut, peningkatan produktivitas pertanian berkontribusi terhadap perbaikan pendapatan dan tingkat konsumsi di kalangan populasi termiskin. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja pertanian juga menunjukkan signifikansi statistik, menandakan bahwa

³ Theodora Melati dan Idris, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian di Indonesia”, *JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 5 Nomor 4, Desember 2023: 7

kontribusi mereka memiliki peranan strategis dalam agenda penanggulangan kemiskinan. Selain itu, ketersediaan lahan pertanian terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian secara tahunan..⁴

Selain itu juga dijelaskan dalam penelitian Ratu Syra Quirinno dan kawan-kawan, dengan judul penelitian “Peran Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Nasional”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan sektor pertanian di Indonesia memegang peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengoptimalkan kontribusi sektor ini, diperlukan pendekatan strategis yang komprehensif, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan volatilitas harga komoditas. Upaya perbaikan sektor pertanian dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, diversifikasi komoditas, serta perumusan kebijakan yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan. Melalui langkah-langkah tersebut, sektor pertanian berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat stabilitas pembangunan ekonomi nasional⁵

⁴ Stevany Keren Tiara Monica, “Peran Pertanian Dalam Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Negara Berkembang Kawasan Asia Timur dan Pasifik”, *Parahyangan Economic Development Review (PEDR)*, Vol. 2 No. 2, 2023:134

⁵Ratu Syra Quirino et al., “Peran Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Nasional, *Nusantara*”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 11 No 7 Tahun 2024: 2811

Penelitian yang dilakukan oleh Tian Mulyaqin dan Dewi Haryani dengan judul penelitian “Aksesibilitas Petani Padi Sawah Terhadap Sumber Permodalan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Di Provinsi Banten” penelitian ini dilatarbelakangi oleh petani dan pelaku agribisnis skala kecil di Provinsi Banten menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya, salah satunya adalah terbatasnya akses mereka terhadap sumber permodalan. Fenomena ini tercermin dari tingkat penyerapan dana yang relatif rendah jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Di tingkat implementasi, penyaluran kredit berbunga rendah yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi kerakyatan termasuk petani, pelaku usaha kecil, dan koperasi masih menghadapi berbagai kendala. Pemangku kebijakan administratif kerap menyatakan bahwa rendahnya realisasi kredit tersebut disebabkan oleh terbatasnya jumlah pemanfaat yang memenuhi persyaratan program. Padahal, yang perlu diperbaiki dalam penyaluran kredit program ini adalah prosedur yang cukup panjang, yang sering kali menjadi penyebab utama ketidakmauan masyarakat pedesaan untuk berhubungan dengan bank.⁶

Selanjutnya data pada latar belakang penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ilmi Farried dan kawan-kawan dengan judul “Peningkatan Produktivitas Pertanian Melalui Adopsi Teknologi: Studi Kasus Peran Petani Milenial Dalam Implementasi Inovasi Pertanian Di Desa Pamah

⁶ Tian Mulyaqin dan Dewi Haryati, “Aksesibilitas Petani Padi Sawah Terhadap Sumber Permodalan Dan Faktor–Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Banten”, *Buletin IKATAN*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2013: 23

Simelir” yaitu penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa generasi milenial semakin berminat untuk terlibat dalam sektor pertanian. Namun, terdapat kesenjangan antara minat tersebut dengan keterampilan dan akses yang diperlukan untuk berhasil dalam pertanian modern. Selain itu, data terbaru juga menyoroti berbagai tantangan infrastruktur di daerah pedesaan, termasuk terbatasnya akses terhadap teknologi dan internet. Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang belum terjangkau layanan internet, yang menghambat petani dalam mengakses informasi dan inovasi pertanian. Keterbatasan pendidikan formal juga menjadi hambatan dalam penerapan teknologi pertanian. Berdasarkan data BPS, partisipasi pendidikan di daerah pedesaan masih rendah, yang mempengaruhi kemampuan petani untuk memahami dan menggunakan teknologi modern. Meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian, petani milenial di desa sering kali menghadapi kesulitan dalam mengadopsi dan menerapkan inovasi teknologi tersebut.⁷

Dari beragam masalah yang dijumpai, pemerintah berperan dalam mengentaskan permasalahan tersebut. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara

⁷ Annisa Ilmi Farried et al., “Peningkatan Produktivitas Pertanian Melalui Adopsi Teknologi: Studi Kasus Peran Petani Milenial Dalam Implementasi Inovasi Pertanian Di Desa Pamah Simelir”, *Seminar Nasional Sosial Humaniora & Teknologi (Sanashtek)*, Vol.2 No. 1: 84-85

mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Maka pemerintah menetapkan regulasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai kebijakan yang melindungi hak-hak mereka dan memberdayakan mereka dalam sektor pertanian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 dijelaskan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Untuk mencapai kesejahteraan petani, beberapa aktivitas spesifik telah difokuskan, seperti upaya meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. Salah satu subprogram yang dijalankan untuk mencapai tujuan ini adalah pemberdayaan petani

Pemberdayaan berarti memberikan kewenangan resmi atau kekuatan hukum untuk memungkinkan seseorang melakukan sesuatu.

Konsep ini sering diartikan sebagai *capacity building for human development*, yaitu proses untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar lebih mandiri, mampu mengakses sumber daya, dan memiliki kontrol atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan pemberdayaan, diharapkan kesejahteraan meningkat, hak-hak diperkuat, dan tercipta kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik, sehingga individu atau kelompok dapat berperan aktif dalam pembangunan dan perubahan positif.⁸

Pemberdayaan petani merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dan kepemimpinan dari kelompok tani yang diberdayakan. Salah satu strategi pemberdayaan yang efektif adalah melalui kelompok tani, yang di pedesaan berfungsi sebagai organisasi informal yang berasal dari, dipimpin oleh, dan melayani petani.⁹ Untuk mengembangkan sumber daya yang berkualitas dan menciptakan masyarakat yang mandiri, penting untuk memiliki petani yang berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Petani perlu mengakses informasi tentang pertanian dan mengikuti penyuluhan atau pelatihan yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan usaha tani. Pemberdayaan petani melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendekatan kelompok dapat membantu meningkatkan

⁸ Gaston Otto Malindir dan Aldi Budi Mashudi, "Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Di Desa Anjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 15 No. 2: 45

⁹ Ibid hal 46

kemampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan lebih baik. Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk membentuk kelembagaan petani yang dapat membangun sinergi antar petani dan antar kelompok tani, yang akhirnya akan meningkatkan efisiensi usaha tani.¹⁰

Di Desa Tuliskriyo, pertanian menjadi salah satu mata pencaharian warganya. Namun, sektor ini sering kali menghadapi berbagai masalah, seperti keterbatasan akses ke teknologi dan modal, serta kurangnya dukungan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Di desa tuliskriyo, terdapat kelembagaan petani yaitu kelompok tani. Kelompok tani ini dibentuk atas dasar kepentingan yang sama yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dari petani dalam kelompok tani. Tujuan pembentukan tersebut tidak selaras dengan program kegiatan dari petani. Pemberdayaan petani pada desa ini masih terbatas pada pembentukan kelembagaan petani yaitu dalam bentuk kelompok tani. Dijumpai juga beberapa dari petani masih sedikit awam terkait urgensi dari pemberdayaan petani, mereka hanya mengetahui dalam bentuk bantuan pemerintah.¹¹ Meskipun suatu program pemberdayaan petani telah berjalan, namun terbilang kurang untuk mendukung usaha tani dalam jangka panjang.

Pemberian bantuan alat pertanian memang cukup penting, tetapi sering kali tidak mencakup kebutuhan lain yang lebih mendasar, seperti pelatihan pertanian yang lebih modern, dan akses pasar untuk mengelola

¹⁰Neti Sunarti, "Efektivitas Pemberdayaan Dalam Pengembangan Kelompok Tani Di Pedesaan", *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 2, Mei 2019: 81

¹¹ Hasil wawancara dengan Dina Wulan Novita Sari sebagai anak dari petani

usaha tani dengan lebih efisien. Tanpa adanya program pemberdayaan yang menyeluruh, petani masih kesulitan untuk mengembangkan usaha tani mereka dan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam tentang kondisi pemberdayaan petani di Desa Tulsikriyo.

Dalam Islam pemberdayaan petani ini juga dianggap penting, hal ini bersandarkan dengan konsep *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah tindakan yang memberikan manfaat bagi banyak orang dan menghindari bahaya bagi umat manusia. Tindakan ini harus sejalan dengan tujuan *syariat*, yaitu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, manfaat yang dihasilkan harus nyata dan bukan hanya asumsi. Tindakan ini juga tidak boleh bertentangan dengan *Al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'*, atau *Qiyas*.¹²

Namun, dalam implementasinya, perlu adanya kerangka yang memastikan bahwa program pemberdayaan yang dijalankan tidak hanya bermanfaat bagi segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat, tanpa merugikan pihak manapun. Dalam konteks ini, perspektif *maslahah mursalah* dapat digunakan untuk menganalisis pemberdayaan petani. *Maslahah mursalah* menekankan pada pentingnya kebijakan yang membawa manfaat nyata bagi mayoritas

¹² Yusuf, *Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Perspektif NU Dan Ulama Mazdhāhib Al-Arbā'ah*, al-Maslahah: -Volume 16 Nomor 1 Juni 2020, hal 173

masyarakat dan sesuai dengan tujuan *syariat*, yaitu untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Dengan menerapkan prinsip *masalah mursalah*, pemberdayaan petani dapat dipandang sebagai upaya untuk mencapai *kemaslahatan* yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program pemberdayaan yang dijalankan tidak hanya memenuhi aspek kemanusiaan dan kesejahteraan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip *syariat* Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pemberdayaan petani dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah*, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip *syariat* yang berlaku.

Pemberdayaan petani dapat berdampak baik bagi petani, salah satunya yaitu meningkatnya usaha tani. Usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari cara seseorang mengelola dan mengoordinasikan faktor-faktor produksi, seperti lahan dan sumber daya alam, sebagai modal, untuk menghasilkan manfaat yang optimal.¹³ Tujuan dari kegiatan usaha tani adalah mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dengan optimal, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa lebih tinggi.

¹³ Riri Oktari Umma, "Efisiensi Penggunaan Faktor-faktor Produksi Pada Usahatani Jagung", *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan* Vol. 1 No. 1: 3

Dengan memahami kekurangan dalam pemberdayaan yang ada, penelitian ini diharapkan bisa memberikan ide dan rekomendasi untuk program pemberdayaan yang lebih tepat guna, yang dapat membantu petani desa menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu pihak terkait untuk merancang program pemberdayaan yang tidak hanya mengandalkan pada bantuan, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh petani untuk berkembang secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemberdayaan petani melalui kelompok tani dalam meningkatkan usaha tani di Desa Tuliskriyo?
2. Bagaimana kesesuaian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 dengan pemberdayaan petani melalui kelompok tani di Desa Tuliskriyo?
3. Bagaimana perspektif *masalah mursalah* dalam memandang pemberdayaan petani melalui kelompok tani di Desa Tuliskriyo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan petani melalui kelompok tani dalam meningkatkan usaha tani di Desa Tuliskriyo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 dengan pemberdayaan petani melalui kelompok tani di Desa Tuliskriyo.
3. Untuk mengetahui perspektif *masalah mursalah* dalam memandang pemberdayaan petani melalui kelompok tani di Desa Tuliskriyo.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan memberikan kebermanfaatan secara praktis maupun teoritis sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kebermanfaatan, untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai strategi pemberdayaan petani melalui kelompok tani di Desa Tuliskriyo dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam

2. Secara praktis

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan sebagai sumber informasi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan petani.
- b. Bagi petani, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan ataupun saran bagi petani untuk kedepannya menjadi petani yang lebih unggul dan bersaing.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Strategi

Strategi adalah proses menentukan tujuan dan target jangka panjang sebuah organisasi. Hal ini mencakup perencanaan tindakan

yang akan dilakukan serta pengarahan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.¹⁴

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan rangkaian upaya yang dirancang untuk memperkuat serta mengoptimalkan potensi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, baik dari segi kemampuan maupun daya saing. Pemberdayaan mencakup upaya untuk menggali dan mengembangkan sumber daya, peluang, pengetahuan, serta keterampilan masyarakat, agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan memegang kendali atas masa depan yang lebih baik.¹⁵

c. Petani

Petani adalah individu yang secara mendalam mengabdikan waktu dan pikirannya untuk kegiatan bercocok tanam. Dalam setiap tahap proses tersebut, mereka juga terlibat dalam pengambilan keputusan yang sangat penting, meskipun umumnya bertindak secara rasional. Sebagai insan ekonomi, petani beroperasi dengan logika dan pertimbangan rasional dalam kapasitas budaya mereka,

¹⁴ Erlina T.V Timpal et.al, “Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara”, *Jurnal Governance* Vol.1, No. 2, 2021: 3

¹⁵ Wahab Syakirul Alim et.al., *Pemberdayaan Masyarakat Konsep dan Strategi*, (PT. Gapte Media Pustaka, Samarinda Maret 2022): 1

namun di sisi lain, mereka sering kali berada dalam posisi yang terpinggirkan, baik secara sosial maupun ekonomi.¹⁶

d. Kelompok Tani

Kelompok tani adalah sekelompok petani yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumber daya), serta tujuan bersama. Dalam kelompok ini, terdapat keakraban dan keserasian di antara anggotanya, yang dipimpin oleh seorang ketua untuk mengarahkan dan memfasilitasi kegiatan bersama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.¹⁷ Kelompok tani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu kelompok tani yang berada di Desa Tuliskriyo, yaitu kelompok tani mugi makmur.

e. Usaha Tani.

Usaha tani adalah kegiatan produksi pertanian yang melibatkan alokasi sumber daya, seperti alam, tenaga kerja, dan modal, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan taraf hidup petani.¹⁸

¹⁶ Yayat Sukayat et.al, “Orientasi Petani Bertani di Lahan Kering Kasus di Desa Jingsang Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang”, *PASPALUM: Jurnal Ilmiah Pertanian*, Vol. 7 No. 2, September 2019: 16

¹⁷ Febronia Gledis Manus et.al., “Kajian Pengembangan Kelompok Tani Di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado”, *Jurnal Transdisiplin Pertanian Agri-SosioEkonomi Unsrat*, Vol.14 No.3 September 2018: 37

¹⁸ Teuku Fadhla, “Analisis Manajemen Usaha Tani dalam Meningkatkan Pendapatan dan Produksi Padi Sawah di Kecamatan Tangan-Tangan Kab. Aceh Barat Daya”, *Jurnal Visioner & Strategis*, Volume 6, Nomor 2, September 2017: 11

f. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013

Undang-undang adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan-peraturan yang dibuat (oleh badan yang pelengkapan negara yang berwenang) sifatnya tertulis dan mengikat setiap orang selaku warga Negara dalam waktu tertentu dan dalam wilayah hukum tertentu pula.¹⁹ Undang-undang nomor 19 tahun 2013 membahas mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani, tepatnya pada pasal 7 ayat 3 mengenai pemberdayaan petani.

g. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah tindakan yang memberikan manfaat bagi banyak orang dan menghindari bahaya bagi umat manusia. Tindakan ini harus sejalan dengan tujuan *syariat*, yaitu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, manfaat yang dihasilkan harus nyata dan bukan hanya asumsi. Tindakan ini juga tidak boleh bertentangan dengan *Al-Qur'an, Hadits, Ijma'*, atau *Qiyas*²⁰

¹⁹ Angga Saputra, "Pengertian Undang-undang", *Varia Hukum*, Edisi No. XXXVI Tahun XXVII September 2016: 847

²⁰ Yusuf, *Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Perspektif NU Dan Ulama Mazdhāhib Al-Arbā'ah*, al-Maslahah: -Volume 16 Nomor 1 Juni 2020, hal173

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual, maka penegasan operasional yang dimaksud dari judul “Analisis Strategi Pemberdayaan Petani Melalui Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Usaha Tani Di Desa Tuliskriyo Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 dan *Maslahah Mursalah* (Studi Pada Kelompok Mugi Makmur Di Desa Tuliskriyo)” adalah analisis proses dari serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pemberdayaan petani melalui perkumpulan petani yang dibentuk atas dasar kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi di Desa Tuliskriyo.. Menganalisis kesesuaian antara Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 dengan pemberdayaan petani di Desa Tuliskriyo. Serta, melihat apakah pemberdayaan petani di Desa Tuliskriyo ini sudah sesuai dengan konsep *masalah mursalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi adalah urutan atau bagian dari susunan skripsi secara keseluruhan. Sistematika pembahasan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :²¹

1. Bagian awal, terdiri dari: beberapa komponen penting, seperti sampul, halaman judul, lembar persetujuan , serta lembar pengesahan dari penguji dan Dekan. Juga disertakan pernyataan keaslian karya yang ditandatangani di atas materai. Bagian tambahan mencakup motto,

²¹ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*: 12-13

persembahan, dan kata pengantar kepada pihak terkait. Selanjutnya disusun daftar isi, lampiran, transliterasi, serta abstrak.

2. Bagian utama (inti), terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan, penelitian ini diawali dengan penjelasan konteks yang memuat permasalahan utama, kesenjangan antara teori dan kenyataan, serta alasan pentingnya topik untuk diteliti, termasuk kekhasan lokasi penelitian. Fokus penelitian mengarahkan pada aspek tertentu yang ditelaah. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan arah studi, sesuai dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, kegunaan penelitian mencakup manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis bagi institusi, masyarakat, serta peneliti lain, yang harus konsisten dengan saran pada bagian akhir. Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah-istilah penting dijelaskan secara rinci guna memastikan kesamaan pemahaman bagi seluruh pembaca.
- b. BAB II Kajian Teori, bab ini membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori besar, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti menjelaskan teori, konsep, dan hasil studi sebelumnya yang mendukung fokus penelitian.
- c. BAB III Metode Penelitian, rancangan penelitian kualitatif mencakup pendekatan, jenis penelitian dan alasan pemilihannya. Peneliti harus hadir langsung di lapangan dan berinteraksi dengan informan. Lokasi dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan tema

dan keunikan yang dimiliki. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara dan observasi, dengan teknik fleksibel yang sesuai konteks. Analisis data bertujuan menemukan makna dan pola, sementara validitas diuji melalui kredibilitas dan kriteria lainnya. Terakhir, tahapan penelitian mencakup seluruh proses dari awal hingga pelaporan akhir.

- d. BAB IV Paparan Hasil Penelitian, berisi hasil temuan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap informasi baru. Temuan harus relevan dengan fokus masalah, didukung oleh data kutipan informan, dan disertai penjelasan untuk memperkuat hasil penelitian.
 - e. Bab V Pembahasan, Pembahasan menjelaskan temuan penelitian dengan dukungan dari informan terpercaya. Temuan tersebut dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dan teori para ahli.
 - f. Bab VI Penutup, Bab penutup terdiri dari tiga bagian utama: Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil penelitian secara singkat dan menjawab pertanyaan penelitian. Saran disusun secara operasional dan dapat diterapkan, berdasarkan hasil temuan penelitian
3. Bagian akhir, mencakup daftar rujukan yang memuat semua sumber yang digunakan dan ditulis sesuai pedoman. Lampiran berisi dokumen penting seperti instrumen penelitian, data mentah, surat izin, serta bukti pelaksanaan penelitian, yang harus diberi nomor urut. Terakhir, daftar

riwayat hidup mencantumkan identitas penulis, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, prestasi, kegiatan organisasi, dan karya tulis.